

## Korelasi Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026

### Correlation of Climate Change Adaptation Action Plan to Tangerang City Regional Development Plan Document 2024-2026

Sri Elda Mariani<sup>1</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Tangerang

Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 33 Cikokol Kota Tangerang

#### ABSTRAK

Rencana aksi adaptasi perubahan iklim telah disusun oleh Tim Kelompok Kerja Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Tahapan penyusunan rencana aksi adaptasi perubahan iklim yaitu dengan melakukan perhitungan tingkat keterpaparan, tingkat sensitivitas, tingkat kemampuan adaptif, tingkat potensi dampak dan tingkat urgensi wilayah serta penyusunan program adaptasi perubahan iklim. Sedangkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tangerang tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021. Dokumen ini disusun sebagai pengganti RPJMD yang sudah habis masa berlakunya. Hal ini dikarenakan adanya kekosongan kepala daerah akibat pilkada serentak. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kuantitatif dengan skala linkert. Hasil analisa dari korelasi rencana aksi adaptasi perubahan iklim terhadap dokumen RPD Kota Tangerang tahun 2024-2026 adalah dari 22 program ada pada rencana aksi adaptasi perubahan iklim ada sebanyak 64% yang programnya memiliki kesesuaian yang sangat erat dengan program yang ada di RPD kota Tangerang tahun 2024-2026, 36% memiliki kesesuaian namun tidak terlalu memiliki keterkaitan erat. Sedangkan program yang tidak memiliki kesesuaian sebanyak 0%. Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa adanya kesinambungan program dari rencana aksi adaptasi perubahan iklim dengan dokumen perencanaan yang sudah disusun.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan, Masyarakat, Kampung Iklim

#### ABSTRACT

The climate change adaptation action plan has been prepared by the Climate Change Mitigation and Adaptation Program Working Group Team. The stages of preparing a climate change adaptation action plan are by calculating the level of exposure, level of sensitivity, level of adaptive capacity, level of potential impact and level of regional urgency as well as preparing a climate change adaptation program. Meanwhile, the Tangerang City Regional Development Plan (RPD) document for 2024-2026 was prepared based on the Instruction of the Minister of Home Affairs number 70 of 2021. This document was prepared as a replacement for the RPJMD which has expired. This is because there is a vacancy in regional heads due to the simultaneous regional elections. The research method used is a quantitative method with a Linkert scale. The results of the analysis of the correlation of the climate change adaptation action plan with the Tangerang City RPD documents for 2024-2026 are that of the 22 programs in the climate change adaptation action plan, 64% of the programs have very close conformity with the programs in the

Email:

<sup>1</sup> rianihex2724@gmail.com

#### Cite This Article:

Mariani, Sri Elda (2023). Korelasi Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Tangerang Tahun 2024-2026. *Jurnal Pembangunan Kota Tangerang* Vol. 1(2), 145-161.



Copyright (c) 2023 Jurnal Pembangunan Kota Tangerang. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

*Tangerang City RPD in 2020. 2024-2026, 36% are compatible but not too closely related. Meanwhile, programs that do not have conformity are 0%. The results of this research illustrate that there is program continuity from the climate change adaptation action plan with the planning documents that have been prepared.*

**Keywords:** *Adaptation, Climate Change, RPD*

## **PENDAHULUAN**

Kota Tangerang pada tahun 2022 telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. Program kerja pertama yang dilakukan adalah menyusun rencana aksi iklim kota Tangerang yang terdiri dari rencana aksi mitigasi dan rencana aksi adaptasi. Penyusunan rencana aksi iklim ini juga mendapatkan bantuan dari lembaga non pemerintah yakni *Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM)*. GCoM merupakan koalisi kota dan pemerintah daerah yang tersebar di berbagai negara dan memiliki komitmen sukarela untuk penanganan perubahan iklim secara aktif untuk bergerak menuju masa depan rendah emisi dan berketahanan iklim. Disamping itu, GCoM juga telah memilih Kota Tangerang sebagai salah satu dari empat kota percontohan GCoM Asia Project di Indonesia (2021-2023) bersama dengan kota Minahasa Utara, kota Pontianak dan kota Medan.

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dibuat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021. Latar belakang dari dikeluarkannya Inmendagri tersebut adalah karena adanya pilkada serentak di tahun 2024 sehingga menyebabkan beberapa daerah otonom tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023. Sehingga dengan tidak adanya kepala daerah, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang seyogyanya dibuat digantikan dengan dokumen RPD dimana didalamnya tidak dicantumkan visi dan misi kepala daerah.

Latar belakang dari penulisan jurnal ini adalah seringkali rencana aksi dibuat namun tidak terintegrasi kedalam dokumen perencanaan yang ada. Hal ini berimplikasi kepada pencapaian target yang sudah disusun pada rencana aksi tidak dapat dievaluasi. Disamping itu, terkesan dokumen yang sudah disusun tidak terkoneksi dan terintegrasi sehingga seakan-akan berjalan sendiri-sendiri.

Maksud dan tujuan dari penulisan jurnal ini adalah menggambarkan terkait hasil dari penyusunan rencana aksi adaptasi perubahan iklim yang sudah disusun oleh Pokja Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kota Tangerang kemudian dikorelasikan dengan keberadaannya pada program yang ada di dokumen RPD Kota Tangerang 2024-

2026. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap program tersebut apakah berkesinambungan antara keduanya. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim yang dinyatakan pada pasal 4 bahwa salah satu tahapan penyusunan aksi adaptasi perubahan iklim adalah pengintegrasian aksi adaptasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, rencana, dan/atau program Pembangunan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim kota Tangerang telah melalui serangkaian kegiatan, termasuk diskusi dengan berbagai pihak, seperti para ahli dari *CCROM SEAP IPB University*, OPD terkait dalam lingkup Pemerintah kota Tangerang, lembaga non-pemerintah, serta Kementerian/Lembaga. Dalam kerangka GCoM Asia Project dan dukungan dari UCLG ASPAC selaku *host* dari Sekretariat GCoM Asia Tenggara, Pemerintah Kota Tangerang melakukan dua kali pelatihan terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta melakukan konsultasi publik dalam mensosialisasikan rencana aksi yang sudah dibuat kepada para pemangku kepentingan di Kota Tangerang.

Penyusunan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan iklim menggunakan metode AR-5 (*Assesment Result-5*) yang sudah ditetapkan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) dengan tahapan pekerjaan adalah sebagai berikut:

### **Penyusunan kajian kerentanan dan potensi dampak**

#### **1. Metode**

Penetapan tingkat kerentanan dan potensi dampak perubahan iklim tingkat kelurahan di Kota Tangerang dihitung dengan menggunakan beberapa data yang dapat merepresentasikan indikator sensitivitas, kemampuan adaptif, dan keterpaparan. Data yang terkumpul untuk perhitungan tingkat kerentanan dan potensi dampak bersumber dari Kecamatan Dalam Angka (KDA), dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dan beberapa kekurangan data dilengkapi dengan data dari Potensi Desa (PODES).

Sensitivitas dan kemampuan adaptif suatu wilayah (dalam hal ini tingkat kelurahan di Kota Tangerang) dapat direpresentasikan oleh kondisi sosial, ekonomi, dan kesehatan, sementara keterpaparan direpresentasikan oleh kondisi biofisik kelurahan. Tingkat

sensitivitas, kemampuan adaptif, dan keterpaparan dapat diukur dengan nilai indeks. Indeks kerentanan ditentukan berdasarkan kombinasi nilai indikator yang digunakan untuk merepresentasikan sensitivitas dan kemampuan adaptif, sedangkan indeks keterpaparan dihitung berdasarkan nilai indikator yang digunakan untuk merepresentasikan keterpaparan. Formula yang digunakan untuk menghitung nilai indeks adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \sum w_i * ID_i$$

Keterangan:

$ID_i$  merupakan nilai indikator ke- $i$  yang sudah dinormalisasi

$w_i$  adalah nilai bobot dari indikator ke- $i$  yang besarnya ditentukan oleh tingkat keamatan atau keterkaitannya dengan sensitivitas, kemampuan adaptif atau keterpaparan.

Mengingat penentuan nilai bobot ( $W_i$ ) akan sangat subjektif, maka dalam analisis ini, besar nilai bobot ditetapkan berdasarkan nilai ragam dari indikator tersebut. Indikator dengan nilai keragaman paling tinggi akan memiliki nilai bobot paling tinggi. Total nilai bobot dari seluruh indikator yang digunakan sama dengan satu.

## 2. Indikator

Indikator yang digunakan untuk tingkat kepaparan di kota Tangerang adalah:

**Tabel 1. Indikator Keterpaparan**

INDIKATOR KETERPAPARAN	SIMBOL
Sebaran Fasilitas Pendidikan	KE 1
Sebaran Fasilitas Kesehatan	KE 2
Kepadatan Penduduk	KE 3

1. Indikator sensitivitas adalah:

**Tabel 2. Indikator Sensitivitas**

INDIKATOR SENSITIVITAS	SIMBOL
Indeks Keluarga Pra Sejahtera	SE 1
Sumber Penghasilan Utama Penduduk	SE 2
Sumber Bahan Bakar Sebagian Besar Penduduk	SE 3
Akses Air Minum dan Fasilitas Jamban	SE 4
Area Pemukiman Kumuh	SE 5
Penanggulangan Sampah	SE 6

2. Indikator kemampuan adaptif adalah:

**Tabel 3. Indikator Kemampuan Adaptif**

INDIKATOR KEMAMPUAN ADAPTIF	SIMBOL
Indeks Pendidikan	KA 1
Akses terhadap Fasilitas Kesehatan	KA 2
Jumlah lembaga kemasyarakatan	KA 3
Jumlah Industri Kecil dan Mikro	KA 4
Akses Masyarakat terhadap Pasar	KA 5
Keberadaan Lembaga Perekonomian	KA 6
Kegiatan Masyarakat berhubungan Lingkungan	KA 7

### 3. Perhitungan Tingkat Keterpaparan

Sebaran tingkat keterpaparan diperoleh dengan mengidentifikasi atas 3 indikator yang ada yaitu sebaran fasilitas pendidikan, sebaran fasilitas kesehatan, dan kepadatan penduduk (Tabel 1). Fasilitas pendidikan mencakup sebaran jumlah SD/MI (Negeri/Swasta), jumlah SMP/MTs (Negeri/Swasta), jumlah SMA/SMK/MA (Negeri/Swasta), dan jumlah perguruan tinggi (Negeri/Swasta) di kelurahan-kelurahan Kota Tangerang. Asumsinya adalah semakin banyak fasilitas pendidikan yang berada di daerah rawan bencana, tingkat keterpaparan terhadap fasilitas pendidikan tersebut juga semakin tinggi. Begitu pula asumsi yang sama untuk sebaran fasilitas kesehatan. Terkait dengan asumsi untuk kepadatan penduduk adalah semakin padat jumlah penduduk pada satu kelurahan maka tingkat keterpaparan terhadap kelurahan tersebut semakin tinggi.

### 4. Perhitungan Tingkat Sensitivitas

Sebaran tingkat sensitivitas diperoleh dengan mengidentifikasi atas 7 indikator yang ada (Tabel 2). Asumsinya adalah semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat, semakin kumuh lokasi lingkungan masyarakat maka semakin sensitivitas masyarakat tersebut.

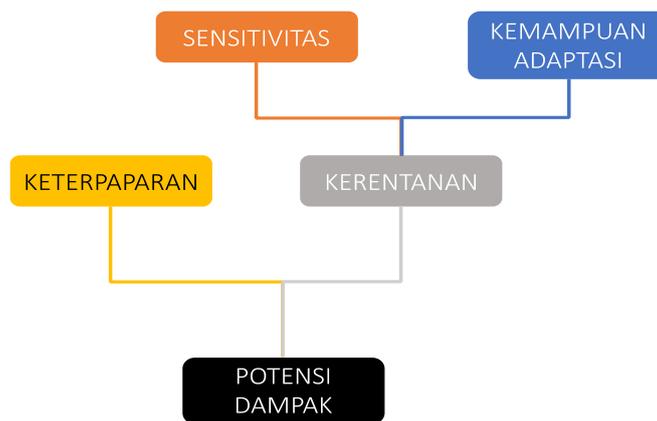
### 5. Perhitungan Kemampuan Adaptif

Analisa perhitungan kemampuan adaptif ini berbanding terbalik dengan tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas. Terdapat 7 indikator yang terkait (Tabel 3) dimana semakin dekatnya akses terhadap fasilitas kesehatan, fasilitas pasar dan tingkat pendidikan masyarakat maka kemampuan adaptifnya semakin besar.

## 6. Perhitungan Tingkat Potensi Dampak

Potensi dampak perubahan iklim kelurahan dikelompokkan menggunakan metode matriks kombinasi tingkat kerentanan dan keterpaparan sesuai dengan pendekatan yang digunakan oleh SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) nasional milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kelurahan dengan tingkat kerentanan tinggi dan tingkat keterpaparan tinggi memiliki kondisi dengan potensi dampak tinggi.

**Gambar 1. Ilustrasi Perhitungan Kerentanan dan Potensi Dampak**



### Perhitungan Tingkat Urgensi Wilayah untuk Pelaksanaan atau Intervensi Program/Kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim

Tingkat urgensi wilayah dihitung berdasarkan kombinasi tingkat risiko iklim dan riwayat kejadian bencana yaitu bencana banjir (Gambar 2). Oleh karena itu, urgensi yang ditentukan yaitu berfokus pada urgensi ekstrem basah atau berkaitan dengan bencana banjir. Selain itu, berdasarkan hasil analisis peluang dan risiko ekstrem kering, wilayah Kota Tangerang juga berpotensi untuk mengalami kekeringan di masa depan sehingga urgensi ekstrem kering juga dihitung. Secara historis, Kota Tangerang pernah mengalami bencana kekeringan (BNPB 2021). Wilayah yang memiliki tingkat risiko iklim tinggi dan saat ini sudah mengalami bencana iklim merupakan wilayah dengan tingkat urgensi tinggi yang perlu segera mendapatkan intervensi kegiatan adaptasi.

**Gambar 2. Ilustrasi Penentuan Tingkat Urgensi Wilayah untuk Pelaksanaan Aksi**



## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kuantitatif dengan merengking dan memetakan program yang ada di dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim terhadap program yang ada pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah kota Tangerang tahun 2024-2026 berdasarkan skala likert (Sugiyono, 2006). Perengkingan menggunakan skala likert dilakukan dengan pengkategorian program yang memiliki kesesuaian yang sangat erat dengan skala 3, sesuai tapi tidak berhubungan erat skala 2 dan tidak ada kesesuaian dengan skala 1.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dari perhitungan dan analisis yang sudah dilakukan oleh Tim Pokja Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim adalah sebagai berikut:

## Tingkat Keterpaparan

Hasil dari perhitungan dan analisa tingkat keterpaparan adalah:

**Tabel 4. Hasil Perhitungan Tingkat Keterpaparan**

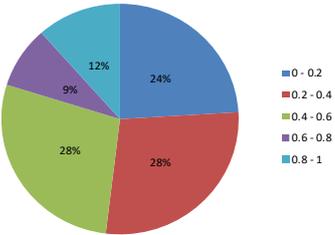
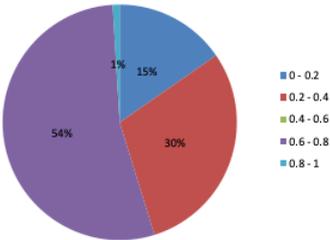
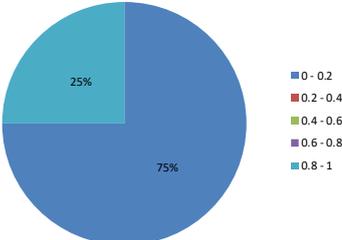
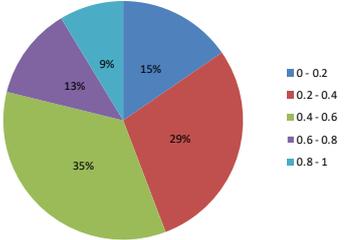
Indikator	Hasil	Analisis
Pendidikan		Sejumlah 40% kelurahan berada pada tingkat keterpaparan yang rendah terhadap sebaran fasilitas pendidikan. Hal ini berarti 40% sebaran fasilitas pendidikan berpotensi rendah untuk terpapar terhadap kejadian bencana terkait perubahan iklim. Hanya terdapat 18% kelurahan yang memiliki tingkat kepaparan tinggi terhadap sebaran fasilitas pendidikan.
Sebaran Fasilitas Kesehatan		44% kelurahan berada pada tingkat keterpaparan yang rendah terhadap sebaran fasilitas kesehatan. Hal ini berarti 44% sebaran fasilitas kesehatan berpotensi rendah untuk terpapar terhadap kejadian bencana terkait perubahan iklim. Hanya terdapat 20% kelurahan yang memiliki tingkat kepaparan tinggi terhadap sebaran fasilitas pendidikan.
Perencanaan Penggunaan Lahan (Kepadatan Penduduk)		Sebanyak 76% kelurahan di Kota Tangerang memiliki tingkat keterpaparan rendah hingga sedang terhadap kepadatan penduduk. Sedangkan 14% kelurahan memiliki tingkat keterpaparan tinggi terhadap kepadatan penduduk.

Catatan: Warna biru menggambarkan nilai sangat rendah (0-0,2), warna merah menggambarkan rendah (0,2-0,4), warna hijau menggambarkan sedang (0,4-0,6), warna ungu menggambarkan tinggi (0,6-0,8), dan warna biru muda menggambarkan sangat tinggi (0,8-1).

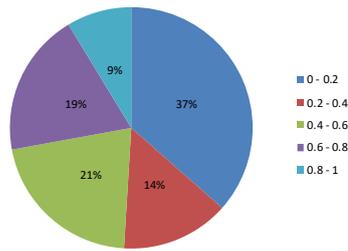
## Tingkat Sensitivitas

Hasil perhitungan dan analisa tingkat sensitivitas adalah:

**Tabel 5. Hasil Perhitungan Tingkat Sensitivitas**

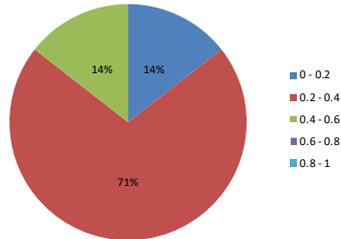
Indikator	Hasil	Analisis
Indeks Keluarga Pra Sejahtera	 <p>           ■ 0 - 0.2            ■ 0.2 - 0.4            ■ 0.4 - 0.6            ■ 0.6 - 0.8            ■ 0.8 - 1         </p>	<p>Sejumlah 21% kelurahan memiliki tingkat sensitivitas tinggi hingga sangat tinggi pada nilai indeks keluarga pra sejahtera. Hal ini berarti sejumlah 21% kelurahan masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi hingga sangat tinggi.</p>
Sumber Penghasilan Utama Penduduk	 <p>           ■ 0 - 0.2            ■ 0.2 - 0.4            ■ 0.4 - 0.6            ■ 0.6 - 0.8            ■ 0.8 - 1         </p>	<p>Sejumlah 55% kelurahan memiliki tingkat sensitivitas tinggi pada indikator sumber penghasilan utama penduduk. Hal ini berarti sejumlah 55% kelurahan masih memiliki sumber penghasilan utama yang sensitif terhadap dampak perubahan iklim.</p>
Sumber Bahan Bakar Sebagian Besar Penduduk	 <p>           ■ 0 - 0.2            ■ 0.2 - 0.4            ■ 0.4 - 0.6            ■ 0.6 - 0.8            ■ 0.8 - 1         </p>	<p>Mayoritas kelurahan (75%) di Kota Tangerang memiliki tingkat sensitivitas rendah dalam hal sumber bahan bakar yang digunakan, namun masih terdapat sebesar 25% kelurahan yang menggunakan bahan bakar dengan tingkat sensitivitas tinggi terhadap perubahan iklim.</p>
Akses Air Minum dan Fasilitas Jamban	 <p>           ■ 0 - 0.2            ■ 0.2 - 0.4            ■ 0.4 - 0.6            ■ 0.6 - 0.8            ■ 0.8 - 1         </p>	<p>Sebagian besar (79%) kelurahan di Kota Tangerang memiliki tingkat sensitivitas rendah hingga sedang dalam indikator akses air minum dan fasilitas jamban. Hal ini berarti akses air minum dan fasilitas jamban di kelurahan-kelurahan sudah cukup baik, namun masih terdapat 24% kelurahan dengan tingkat sensitivitas tinggi dan sangat tinggi.</p>

Area Pemukiman Kumuh



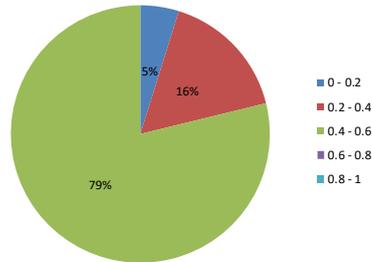
Sebagian besar kelurahan (72%) memiliki tingkat sensitivitas rendah untuk indikator area pemukiman kumuh, namun terdapat 28% kelurahan yang berada pada tingkat sensitivitas tinggi untuk area pemukiman kumuh.

Penanggulangan Sampah



Penanggulangan sampah di kelurahan Kota Tangerang memiliki tingkat sensitivitas rendah hingga sedang.

Status stunting masyarakat kota Tangerang



Sebagian besar (79%) kelurahan di Kota Tangerang berada pada tingkat sensitivitas sedang untuk status stunting masyarakat.

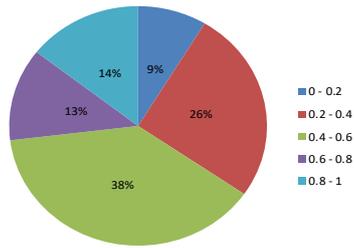
Catatan: Warna biru menggambarkan nilai sangat rendah (0-0,2), warna merah menggambarkan rendah (0,2-0,4), warna hijau menggambarkan sedang (0,4-0,6), warna ungu menggambarkan tinggi (0.6-0.8), dan warna biru muda menggambarkan sangat tinggi (0,8-1).

Tingkat Kemampuan Adaptif

Tabel 6. Hasil Perhitungan Tingkat Kemampuan Adaptif

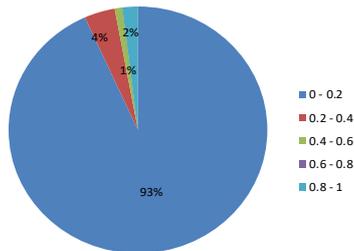
Indikator	Hasil	Analisis												
Indeks Pendidikan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sensitivity Level</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 - 0.2</td> <td>63%</td> </tr> <tr> <td>0.2 - 0.4</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>0.4 - 0.6</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>0.6 - 0.8</td> <td>14%</td> </tr> <tr> <td>0.8 - 1</td> <td>8%</td> </tr> </tbody> </table>	Sensitivity Level	Percentage	0 - 0.2	63%	0.2 - 0.4	11%	0.4 - 0.6	5%	0.6 - 0.8	14%	0.8 - 1	8%	63% kelurahan di Kota Tangerang masih memiliki indeks pendidikan yang sangat rendah, namun terdapat 22% kelurahan dengan nilai indeks pendidikan tinggi hingga sangat tinggi.
Sensitivity Level	Percentage													
0 - 0.2	63%													
0.2 - 0.4	11%													
0.4 - 0.6	5%													
0.6 - 0.8	14%													
0.8 - 1	8%													

Akses terhadap Fasilitas Kesehatan



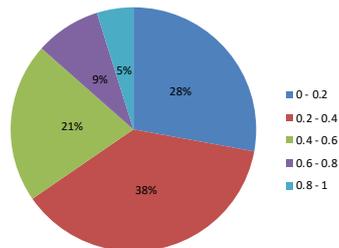
27% kelurahan di Kota Tangerang memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan tinggi hingga sangat tinggi dan terdapat 36% kelurahan dengan akses terhadap fasilitas kesehatan yang rendah.

Jumlah lembaga kemasyarakatan



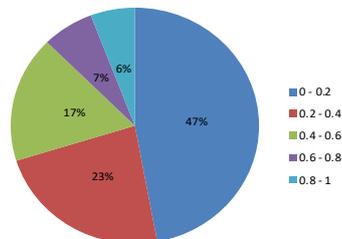
93% kelurahan di Kota Tangerang memiliki nilai rendah untuk kapasitas adaptif yang berkaitan dengan lembaga kemasyarakatan.

Jumlah Industri Kecil dan Mikro



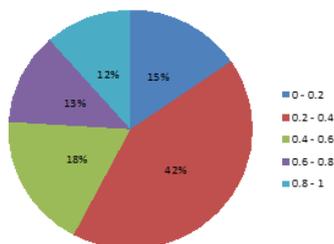
66% kelurahan memiliki nilai indikator jumlah industri kecil dan mikro yang rendah.

Akses Masyarakat terhadap Pasar



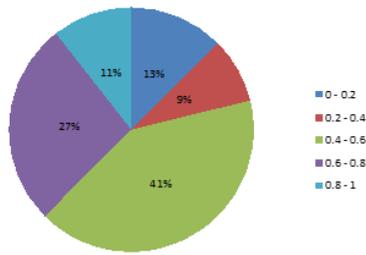
70% kelurahan memiliki nilai indikator akses terhadap pasar yang rendah.

Keberadaan Lembaga Perekonomian



57% kelurahan memiliki nilai indikator jumlah keberadaan lembaga perekonomian yang rendah.

Kegiatan Masyarakat berhubungan Lingkungan



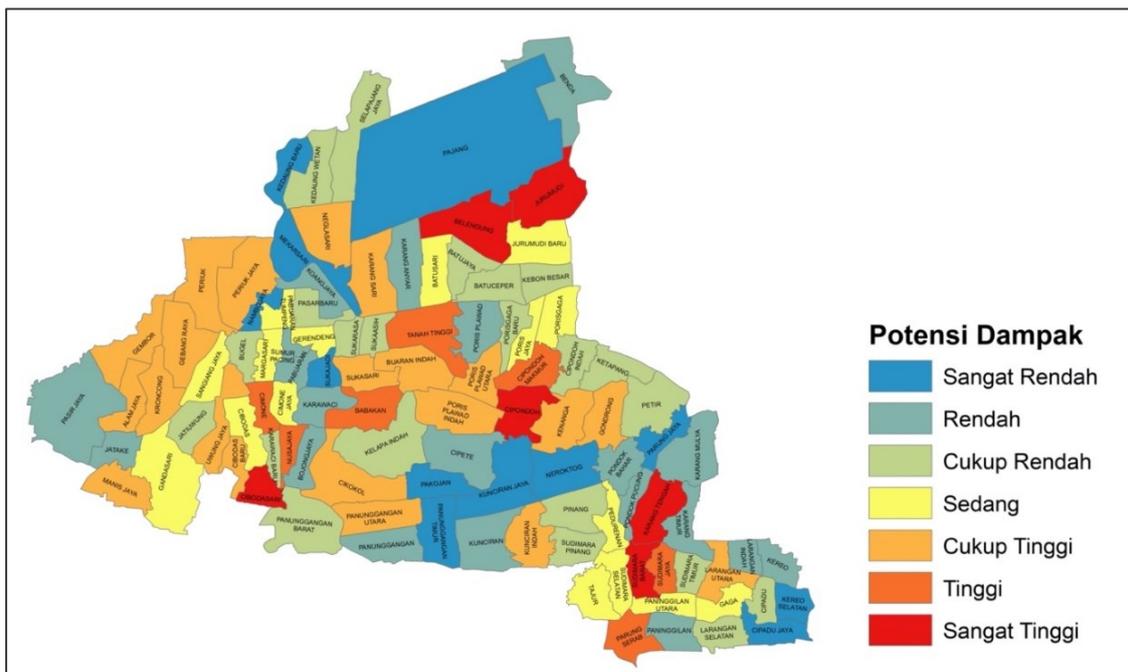
38% kelurahan memiliki kegiatan masyarakat berhubungan lingkungan yang tinggi hingga sangat tinggi. Masih terdapat 27% kelurahan dengan kegiatan yang rendah.

Catatan: Warna biru menggambarkan nilai sangat rendah (0-0,2), warna merah menggambarkan rendah (0,2-0,4), warna hijau menggambarkan sedang (0,4-0,6), warna ungu menggambarkan tinggi (0,6-0,8), dan warna biru muda menggambarkan sangat tinggi (0,8-1).

### Tingkat Potensi Dampak

Berdasarkan hasil pengolahan data, terdapat 6 kelurahan (Gambar 3) yang berada pada tingkat potensi dampak sangat tinggi, yaitu Kelurahan Sudimara Barat, Karang Tengah, Cipondoh, Cibodasari, Belendung, dan Jurumudi. Tingkat potensi dampak diperoleh dengan mengelaborasi data-data dari tingkat keterpaparan dengan tingkat sensitivitas kemudian disandingkan dengan data tingkat kemampuan adaptif.

**Gambar 3. Sebaran Spasial Tingkat Potensi Dampak Kelurahan di Kota Tangerang**



### Analisa Urgensi Wilayah

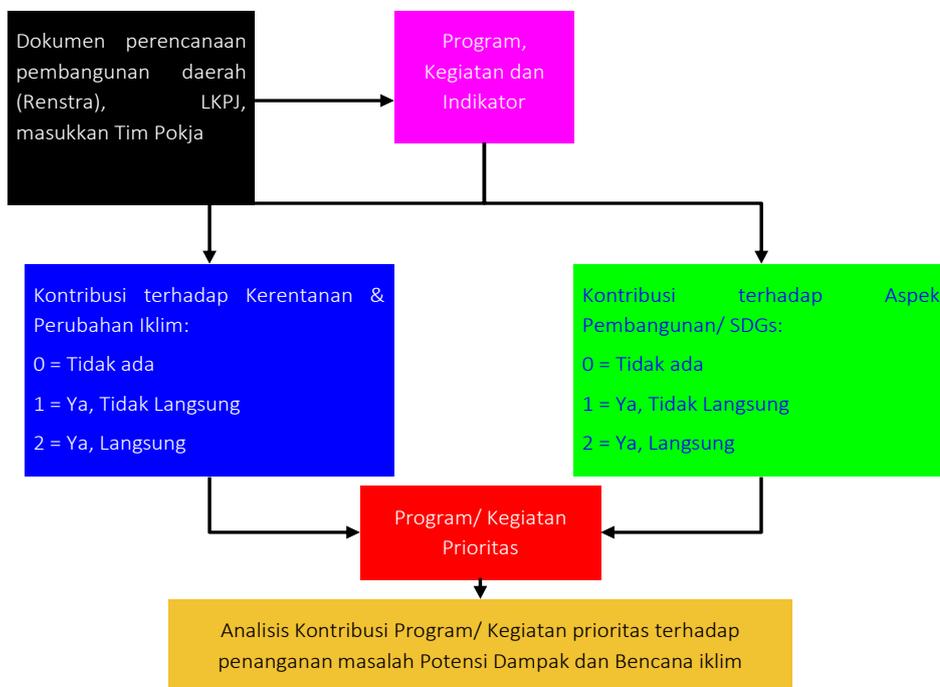
Peta urgensi wilayah diperoleh dengan menyandingkan peta risiko iklim kering dan peta risiko iklim basah dengan peta tingkat potensi dampak. Hal ini didasarkan bahwa bentuk bencana yang ada di kota Tangerang adalah kekeringan dan banjir.

Berdasarkan hasil yang ada, pola adaptasi di masa mendatang perlu memperhatikan kondisi risiko yang akan dihadapi sesuai dengan ancaman yang ada. Dengan perbaikan infrastruktur kelurahan dan kemampuan adaptasi masyarakat, diharapkan kerentanan kelurahan-kelurahan tersebut terhadap ancaman iklim ekstrem kering dapat dikurangi sehingga menurunkan tingkat risiko iklim ekstrem kering. Hal yang sama juga dilakukan untuk tingkat risiko iklim ekstrem basah. Berdasarkan Analisa, diperoleh bahwa terdapat 1 kelurahan yang berada pada tingkat urgensi wilayah tinggi karena mengalami lebih dari 1 jenis bencana.

### Penentuan Program pada Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim

Penentuan program pada rencana aksi adaptasi perubahan iklim digambarkan pada diagram dibawah ini:

**Gambar 4. Proses Penetapan Prioritas Program dan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim**



Saat proses penetapan prioritas program dan aksi adaptasi perubahan ini, dokumen RPD Kota Tangerang 2024-2026 belum disusun. Sehingga untuk melihat kesinambungan program maka penulis melakukan analisa penyandingannya.

### **Analisa Penyandingan Program Rencana Adaptasi Perubahan Iklim Dengan Program RPD Kota Tangerang Tahun 2024-2026**

Adapun hasil Analisanya adalah sebagai berikut :

**Tabel 7. Analisa Penyandingan Program Rencana Adaptasi Perubahan Iklim Dengan Program RPD Kota Tangerang Tahun 2024-2026**

Program pada Rencana Adaptasi Perubahan Iklim	Program pada RPD Kota Tangerang 2024-2026	Skala Likert		
		1	2	3
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		2	
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		2	
Program Pemberdayaan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial		2	
Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana			3
Program Pengelolaan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan		2	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			3
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase			3
Program Penyelenggaraan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan			3
Program Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana		2	
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan			3
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		2	
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		2	
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		2	

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	3
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	3
Program Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	3
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3
Program Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman	3
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	3

Berdasarkan hasil perengkingan yang sudah dilakukan, ada beberapa temuan yang diperoleh yaitu:

1. Dari 22 program yang ada pada rencana aksi adaptasi perubahan iklim terdapat 14 program (64%) yang memiliki kesamaan yang erat terkait kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Terdapat 7 program (36%) yang memiliki kesesuaian namun tidak terlalu memiliki keterkaitan erat. Hal ini dikarenakan beberapa indikator ada yang berbeda dimana pada dokumen RPD kota Tangerang Tahun 2024-2026 jumlah dan cakupan indikatornya ada yang bertambah ada juga yang berkurang. Sebagai contoh Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) pada Rencana Aksi Adaptasi didalamnya termasuk terkait dengan pengelolaan titik lokasi dekorasi kota dan reklame namun pada RPD Kota Tangerang tahun 2024-2026 tidak ada. Atau contoh lainnya pada Program Pengelolaan Pendidikan dimana pada Rencana Aksi Adaptasi termasuk didalamnya terkait Pembangunan Posyandu namun pada RPD Kota Tangerang tahun 2024-2026 tidak termasuk karena sudah dipindah kepada program yang lain.

3. Tidak ada program yang tidak diakomodir pada dokumen RPD Kota Tangerang tahun 2024-2026. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya kesinambungan program dari rencana aksi adaptasi perubahan iklim dengan dokumen perencanaan yang ada.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa adanya kesinambungan program dari rencana aksi adaptasi perubahan iklim dengan dokumen perencanaan yang sudah disusun. Hal ini mengindikasikan adanya komitmen dari Pemerintah Kota Tangerang untuk menjalankan Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim yang sudah dirumuskan. Kedepannya diharapkan program yang sudah ada untuk juga dievaluasi terkait kinerjanya dan relevansinya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di masa yang akan datang

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

1. GCOM Asia Project Team atas bantuannya sehingga tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Iklim Kota Tangerang 2030
2. CCROM SEAP IPB University atas bantuan teknisnya dalam penyusunan GCOM Asia Project Team atas bantuannya sehingga tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Iklim Kota Tangerang 2030
3. Tim Pokja Mitigasi dan Adaptasi Kota Tangerang khususnya Pak Tri (Kabid Sarpras), Bu Wahyu Triastuti Pramono, ST (DLH) dan Maryanti, S.Pd., M.AP. (Bappeda)

## **REFERENSI**

- BNPB. (2021). Kajian Risiko Bencana Kota Tangerang 2021 – 2026.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
- IPCC. (2013). *Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013 : The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)].

Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

Kelompok Kerja Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kota Tangerang. (2022).  
*Tangerang Climate Action Plan 2030*.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor  
P.33/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi  
Perubahan Iklim

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*. Bandung : Alfabeta.